

REVOLUSI PANDEMI COVID-19

Adelia Hanny Rachman

Magister Antropologi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

e-mail: adelia@alumni.ui.ac.id

Abstrak

Sejak masuknya SARS-CoV-2 di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga November 2021, terdapat lebih dari 4 juta warga negara Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19 dengan lebih dari 11 ribu kasus aktif (Satgas Penanganan Covid-19). Segala akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat dunia merupakan suatu cerminan deglobalisasi. Kondisi ini juga menjadi titik balik pengaturan ulang global dan juga dapat dipertimbangkan sebagai revolusi hening yang membawa perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan manusia. Setidaknya pandemi mempertaruhkan dua unsur dasar penting yang menyangkut kelangsungan hidup manusia, yakni ekonomi dan kesehatan. Selama ini globalisasi menuntut dunia bergerak dinamis dan mengepakan sayap kapitalisme, khususnya sejak abad ke-18 ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Tragedi hari ini justru mendorong manusia melakukan perubahan secara signifikan dan fundamental guna memelihara kelangsungan hidup bersama. Artikel ini ditulis dengan perspektif makrososiologis untuk melihat akibat pandemi Covid-19 terhadap korelasi sosial dalam hal primer kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Normal Baru, Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial, Revolusi Pandemi.

Abstract

Since SARS-CoV-2 has emerged in Indonesia in early 2020 until November 2021, there have been more than 4 million Indonesian citizens confirmed positive for Covid-19 with more than 11 thousand cases. The impact of the Covid-19 pandemic that is felt by almost the entire world community is a reflection of deglobalization. This condition is also become a turning point for global resettlement and can also be considered as a quiet revolution that brings fundamental changes in the order of human life. At least a pandemic risks two important basic elements concerning human survival, namely the economy and health. So far, globalization has demanded that the world move dynamically and flap the wings of capitalism, especially since the 18th century when information and communication technology developed rapidly. Today's tragedy encourages humans to make significant and fundamental changes in order to maintain mutual survival. This article was written with a macro-sociological perspective to see the impact of the Covid-19 pandemic on social correlation in terms of the primary life of Indonesian people.

Keywords : Covid-19 Pandemic, New Normal, Pandemic Revolution, Social Change.

PENDAHULUAN

Telah hampir dua tahun pandemi Covid-19 berada di tengah masyarakat Indonesia dengan segala kesedihan dan ketidakpuasan yang mendasarinya, kini

statusnya diprediksi akan beralih dari pandemi menjadi endemi. Mewabahnya virus ini secara global telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Perubahan ekonomi,

budaya, bahkan politik berpengaruh terhadap setiap kebijakan. Pada kondisi pandemi, dunia dalam keadaan terancam. Kerumitan dan ketidakpastian disebabkan oleh ketidaksielarasan kecepatan perubahan yang terjadi dengan kemampuan adaptasi masyarakat menyebabkan kekacauan dalam berbagai sektor. Keadaan ini dapat dilihat dari pola manajemen penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah yang cenderung tersentralisasi pada awalnya. Kemudahan akses terhadap informasi dan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia secara implisit menunjukkan adanya suatu keistimewaan sebagai wilayah pusat pemerintahan dan perdagangan dibandingkan daerah lain di luar Jawa atau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Wilayah urban dan padat penduduk di Indonesia memiliki probabilitas terpapar Covid-19 lebih besar dibandingkan wilayah lain. Namun, tidak dapat dikelak bahwa Covid-19 menyerang semua kalangan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kini, kasus Covid-19 juga ditemui di wilayah adat, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Apau Kayan di Kalimantan Utara, Enggano di Bengkulu Utara, Marlasi di Kepulauan Aru, dan Kasepuhan Citorek di Banten (Project Multatuli, 2021).

Ironisnya, adaptasi manusia tidak secepat perkembangan dan transformasi virus itu sendiri, disamping itu keterbatasan sumber daya membuat setidaknya dua faktor strategis tidak dapat berjalan beriringan, yakni kesehatan dan ekonomi – keduanya terpaksa dikompromikan satu dengan yang lain. Pandemi melemahkan kemampuan manusia untuk menjaga keseimbangan diantara kedua sektor tersebut serta prioritas pilihan mengubah pilihan ke depan (Gans, 2020). Hal ini mengakibatkan masyarakat terpecah. Sebagian dari mereka memiliki pilihan prioritas yang berbeda dari yang lain, entah prioritas kesehatan di atas ekonomi (health before wealth) atau prioritas ekonomi di atas kesehatan (wealth before health). Disinilah terjadi perubahan

perilaku sosial secara masif, signifikan, fundamental, dan terstruktur..

METODE

Fenomena pandemi Covid-19 diamati melalui observasi dan dianalisis dalam perspektif makrososiologis melalui kajian kepustakaan dan pengamatan terhadap berbagai peristiwa menyangkut pandemi Covid-19. Penggambaran sifat-sifat universal atau mikroskopik dalam tulisan ini mengacu pada tiga tingkatan, yakni unit, sub-unit, dan supra unit dengan fokus pada nilai-nilai dan perubahan perilaku, masyarakat Indonesia, dan lingkungan global (Etzioni 2017, 12). Penggunaan teori umum diharapkan dapat memungkinkan spesifikasi proses kausal sehingga menuntut teori penjelas berperan besar dalam keterbukaan terhadap pengujian empiris (Goldthorpe, 2007). Fakta empirik terkait masyarakat adat dituangkan dengan sedikit disinggung guna mengetahui perbedaan penerimaan perubahan sosial pada masyarakat umum dan masyarakat adat. Formulasi analisis skala makro Coleman diadopsi untuk mengetahui bagaimana pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Analisis didasarkan pada paradigma tertentu yang mana penggunaan paradigma disesuaikan – bukan karena kebenaran paradigma yang digunakannya tetapi karena itu dianggap berguna (Sayer 2010, 31). Paradigma fungsionalisme dalam hal ini digunakan untuk mendukung analisa terhadap perubahan sosial yang terjadi. Paradigma ini diharapkan mampu memberikan pandangan intertekstualitas terhadap keilmuan (teoritis) dan kenyataan (empiris). Sebagaimana paradigma merupakan suatu bentuk aktualisasi konstruksi abstrak (Kaplan dan Wolf 2017, 118).

Perubahan yang dialami saat ini terjadi secara tidak direncanakan akibat adanya bencana pandemi yang mengancam hakikat hidup masyarakat banyak. Pandemi melahirkan perubahan sosial universal yang terjadi secara global. Perubahan sosial di masa pandemi mengakibatkan terjadinya perubahan dalam hubungan atau interaksi sosial –

pergeseran cara atau budaya bersosialisasi. Apakah benar perubahan itu terjadi? Giddens berpendapat pengidentifikasian adanya suatu perubahan dilihat dari sejauh mana modifikasi terjadi dalam struktur yang mendasari suatu objek atau situasi dalam kurun waktu tertentu (Giddens, 2009). Kata 'struktur' dalam kajian ini bukan secara khusus mengarah pada konsep struktur sebagaimana dipahami dalam aliran strukturalisme melainkan merujuk pada sudut pandang makro dan agregat terhadap fenomena sosial 'pandemi Covid-19' yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Mengingat perubahan relasional itu terjadi secara sistemik yang di dalamnya masyarakat dapat mengidentifikasi perubahan budaya dan interaksi sosial serta kelembagaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung sangat memengaruhi keseluruhan sistem sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatanan ekonomi internasional merupakan suatu bagian dari manifestasi budaya global yang mengedepankan tujuan perolehan keuntungan – manifestasi ini tak terkecuali juga diberlakukan di lingkungan masyarakat adat, seperti pengembangan sektor ekonomi industri kayu, pertambangan, budidaya tanaman komersial, dsb. (Persoon, 1998). Kekuasaan atas orang lain dikaitkan dengan fleksibilitas alam yang berasal dari imitasi dan simpati yang kemudian membuat manusia cenderung mengarah pada perubahan sosial (Cooley, 1897). Menurut Cooley, sifat manusia sulit diubah tetapi kualitasnya yang paling umum adalah kerentanan terhadap pengaruh sosial. Adapun yang dimaksud di sini yakni bahwa pembawaan alamiah manusia memang sulit diubah tetapi perilakunya dapat berubah sesuai dengan pengaruh sosial yang diterimanya.

Perubahan sosial merupakan suatu hasil usaha manusia untuk mengendalikan kondisi di luar kendali dirinya – berasal dari luar atau yang menyangkut faktor-faktor eksternal (MacIver dan Page 1957, 513). Pandemi Covid-19 dapat diperhitungkan sebagai faktor pemicu

perubahan sosial. Parsons (1967) menerangkan pandangan Spencer bahwa konsep ekuilibrium (kesetimbangan) menjadi poin acuan fundamental untuk menganalisis proses akibat penerimaan urgensi yang dipaksakan oleh faktor eksternal (perubahan lingkungan) meskipun tanpa perubahan penting dalam strukturnya (Perrin 1973, 53). Akibat merebaknya virus corona, membuat lingkungan fisiologis juga mengalami perubahan terlebih ketika penyebarannya melalui droplet, termasuk yang terkandung di udara. Faktor lanjutan ini kemudian 'mengancam' keselamatan jiwa manusia karena lingkup penyebarannya yang tidak terbatas sementara kapasitas manusia dan sumber daya yang dimiliki terbatas. Hal ini secara cepat menggiring perubahan signifikan, khususnya terkait pembatasan bersosialisasi. Sosialisasi selama ini menjadi kunci penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan sosial dapat dianggap sebagai suatu perilaku adaptif dan responsif dalam rangka menyeimbangkan situasi kondisi dalam jangka waktu tertentu dan mengarah pada pembentukan sistem baru (Cosser 1957, 201). Selain itu, tentu perubahan sosial mensyaratkan adanya modifikasi, restrukturisasi cara-cara dasar interaksi sosial (hubungan timbal balik) antarindividu dalam masyarakat (Vago dan Barkan 2018, 208). Penciptaan dan pengimplementasian prosedur protokol kesehatan yang harus ditaati oleh setiap orang merupakan suatu bentuk adaptasi dan respon terhadap bencana pandemi Covid-19. Internalisasi dan implementasi protokol kesehatan lambat laun membuat perubahan sosial tersebut membudaya.

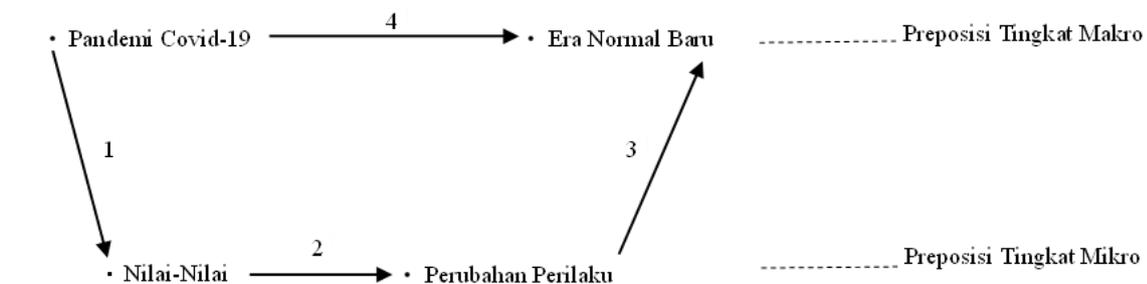
Terkait dengan perubahan yang ada di tengah masyarakat, tidak selamanya dapat diterima dengan mudah olehnya. Misalnya, pembangunan di wilayah masyarakat adat, mengakibatkan perubahan yang menurut mereka signifikan meskipun tidak selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang diyakininya. Masyarakat adat mendeferasiasikan dirinya dengan masyarakat umum atau modern

setidaknya menurut DiMaggio (1994) dikarenakan nilai-nilai yang dianutnya merupakan nilai-nilai yang bebas (independent) tidak terkait dengan kondisi sosial ekonomi – nilai-nilai tradisional tersebut akan tetap memberikan pengaruh independen pada perubahan budaya yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi (Inglehart dan Baker, 2000). Begitu juga pada perubahan sosial – kebiasaan menaati protokol kesehatan – tampaknya sedikit lebih susah untuk dapat diinternalisasikan ke dalam kehidupan masyarakat adat karena alasan kurang lebih sama. Dalam perubahan sosial, perubahan perilaku itu didorong oleh banyak hal, diantaranya motif, sikap, disposisi kebutuhan, kompleks kognitif nirsadar, wujud hubungan aksi-reaksi rangsangan, serta tuntutan status, peran, dan situasional (Lyman, 1988, 296-97). Pendapat ini dikutip Lyman dan menjadi pengantar argumen Blumer dalam kritiknya terhadap aliran perilaku, ia meletakkan ketidaksetujuannya pada pendapat yang menganggap tindakan manusia sebagai faktor pemicu atau kombinasi dari berbagai faktor ‘kehirian’ yang mengabaikan proses interaksi diri yang mana hal itu berguna bagi individu untuk melakukan penilaian terhadap apa yang dihadapinya yang digunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk bersikap tindak. Meskipun demikian, sekiranya pendapat yang dikritik Blumer pada dasarnya tepat dan realistis atau bahkan justru secara implisit memberikan ruang bagi individu-individu untuk

melakukan pengayaan tersebut atau bahkan di sisi lain kritik Blumer mengarah pada perbedaan sudut pandang dalam menelaah perilaku, yang menurutnya evaluasi tindakan tidak hanya dilihat dari sudut pandang di luar individu tersebut tetapi juga melihat lebih dalam dan memperhitungkan perspektif individu yang bersangkutan.

Ahmed dan Jackson merujuk pada tulisan Braveman dan Gottlieb, menyatakan bahwa pendekatan perubahan perilaku individu tidak cukup dalam rangka mengurangi ketidaksetaraan dalam krisis kesehatan publik, khususnya di masa pandemi – hasil kesehatan tidak hanya ditinjau dari faktor tingkat individu, baik perilaku maupun genetik, melainkan dibentuk oleh resiko dan kondisi sosial yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, di lingkungan rumah, sekolah, dan kerja (Braveman dan Gottlieb, 2014; Ahmed dan Jackson, 2021). Kombinasi dinamis teori makro-mikro digunakan untuk menampilkan hubungan kausal yang direpresentasikan dalam tinjauan terhadap fenomena sosial pandemi Covid-19 yang di dalamnya lebih lanjut menelaah pengalaman (aksi) dan kesadaran masyarakat (Blossfeld 1996, 191). Mikrososiologi merupakan prinsip-prinsip interaksi antarindividu sebagai manusia dalam tangkapan panca indera satu dengan lainnya dan menjadi dasar untuk memahami pola yang lebih besar (Collins 1988, 242).

Bagan 1. Adopsi Preposisi Tingkat Makro–Mikro
 Perubahan Sosial Akibat Revolusi Pandemi Covid-19 (Coleman, 1990)



Perubahan secara cepat terjadi sejak awal tahun 2020 dapat

dipersepsikan sebagai revolusi sosial yang mana bukan hanya seperti apa yang

diungkapkan oleh Tiruneh bahwa revolusi sosial didefinisikan sebagai pemberontakan rakyat yang mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang ada (Tiruneh, 2014) – dalam konteks yang berhubungan dengan regim politik negara. Lain daripada itu, dalam konteks yang terjadi hari ini, perubahan dalam rentang waktu singkat ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk revolusi. Saya menyebutnya revolusi pandemi. Perubahan menghadirkan penormalan nilai-nilai baru yang sejatinya hingga kurun waktu tertentu nilai-nilai ini akan dijalankan sebagaimana masyarakat membutuhkannya guna pemenuhan berbagai tuntutan kebutuhan secara pribadi dan sosial.

Revolusi pandemi terjadi dalam kurun waktu singkat (cepat), tanpa kekerasan (damai), dan tidak terencana yang mengenai unsur-unsur kehidupan dan kelembagaan sosial karena yang sedang diperjuangkan adalah menyoal keselamatan jiwa “kesehatan” bukan urusan yang berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Konsekuensinya, perubahan yang terjadi secara cepat tersebut menimbulkan disorganisasi sementara sebagai bagian dari proses adaptasi. Revolusi pandemi senyatanya menunjukkan adanya perubahan sosial masif dalam [struktur] masyarakat yang menyebabkan kekacauan di berbagai lini kehidupan, terutama mengenai sektor strategis. Perkembangan peradapan manusia secara global menunjukkan interdependensi antara manusia dengan sub sistem manusia lainnya, infrastruktur kritis pada batas tertentu, seperti perumahan, rumah sakit, sistem transportasi dan keamanan, perbankan, pasar, pemasok listrik dsb – kegagalan salah satu lembaga atau institusi tersebut maka akan secara langsung memengaruhi performa yang lain atau dengan kata lain memiliki efek domino (Mackenzie, 2020). Menurut Mackenzie, dalam sistem yang kompleks terdapat kemungkinan atas hilangnya suatu kompleksitas secara cepat dengan sangat sulit mencapai pengembalian ke keadaan semula atau lebih baik. Bagian daripadanya,

Mackenzie menyebutnya dengan istilah termodinamika, yakni pelepasan energi sedangkan pada saat bersamaan dibutuhkan.

Pandemi Covid-19 memperlihatkan dengan jelas kerentanan sistem masyarakat global saat ini. Homer-Dixon menyebutnya sebagai peristiwa kritis global (a global tipping event) yang di dalamnya berbagai sistem sosial berubah secara bersamaan menuju ke keadaan yang baru (Homer-Dixon, 2020). Keberadaan pandemi menciptakan penormalan baru (new normal), misalnya perubahan dari segala kegiatan berbasis offline menjadi online. Dikarenakan virus corona berpindah melalui mobilisasi orang yang melibatkan interaksi sosial, maka diadakan pembatasan ruang gerak yang meliputi jaga jarak (social distancing) dan pembatasan perjalanan (travel restriction), pembatasan segala aktivitas yang berpotensi menularkan virus, hingga penggunaan atribut tertentu seperti masker sebagai bentuk kebiasaan baru yang bertujuan mencegah dan mengendalikan persebaran Covid-19. Hasil 4 dari 13 penelitian menunjukkan masker wajah berfungsi secara efektif dalam menangkal infeksi pernafasan (Barasheed 2016, 4). Protokol kesehatan dianggap sebagai suatu tanggung jawab sosial yang berlaku secara individual dan komunal sehingga penerapannya bertujuan untuk melindungi individu yang bersangkutan sekaligus orang lain.

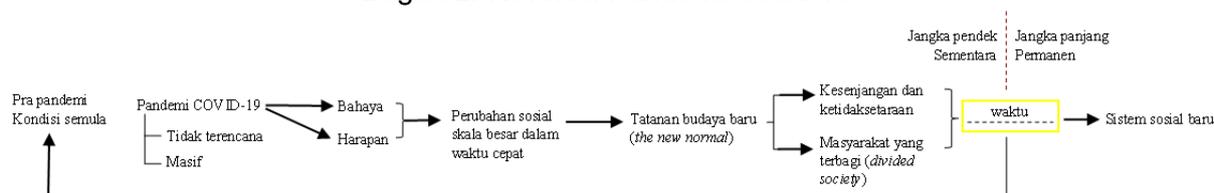
Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia saat ini sangat bergantung pada teknologi dan informasi, keilmuan, dan inovasi. Realitas sosial implementasi teknologi sangat kompleks – teknologi dibawa ke dalam lingkungan yang berbeda-beda dengan tujuan dan dampak yang juga berbeda atau bahkan ada kemungkinan berlawanan (Liker, 1999). Upaya pemerintah dalam mengedukasi dan mewajibkan setiap individu untuk patuh terhadap protokol kesehatan setidaknya dikomunikasikan secara persuasif yakni dengan mengomunikasikan resiko dan bahaya Covid-19 terhadap masyarakat secara konsisten dan tidak kontradiktif sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan mereka akan

menyesuaikan dirinya dengan kebijakan tersebut (Gans, 2020). Semua informasi disediakan melalui sarana teknologi. Difusi teknologi dapat menjadi ketahanan baru bagi masyarakat adat, khususnya guna meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya sebagai bagian dari upaya preventif, kuratif, dan represif sekaligus. Kehadiran pandemi Covid-19 di sisi lain melanggengkan sistem interrelasi yang menghubungkan unit satu berinteraksi dengan unit lain (baik dalam organisasi maupun non organisasi) secara efektif dalam jaringan yang memungkinkannya terlibat aktif dalam arus komunikasi (Hawley 1992, 10). Sebagai ancaman bersama, pandemi Covid-19 melahirkan solidaritas lebih dalam rangka mencari solusi untuk keluar dari kekacauan yang terjadi.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh masyarakat. Prioritas kebutuhan ekonomi dan kesehatan yang

sangat berkaitan erat kini diambang pertaruhan. Manusia secara terpaksa harus memilih bagaimana untuk tetap bertahan hidup. Masyarakat kelas menengah ke atas dapat dikatakan memiliki ketahanan lebih dikarenakan ketersediaan sumber daya (ekonomi), namun masyarakat kelas menengah ke bawah justru semakin rentan manakala mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup. Perubahan yang terjadi secara cepat (*rapid change*) mengakibatkan masyarakat terbagi dalam beberapa golongan, yakni masyarakat patuh, masyarakat garis tengah, dan masyarakat penyangkal. Hal ini secara tidak langsung merefleksikan adanya ketakutan dalam skala kolektif yang kuat yang mempengaruhi sikap tindak individu di dalamnya termasuk dalam mempertaruhkan politik dan posisi keuangannya (Wettergren, Holmes, dan Manning 2020, 116).

Bagan 2. Revolusi Pandemi Covid-19.



Golongan masyarakat patuh akan bersimpati dan berempati, menaruh perhatian lebih pada segala yang menyangkut upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam penerapan setiap kebijakan publik. Golongan masyarakat garis tengah, bersifat tenang, tidak banyak menaruh perhatian lebih pada segala yang menyangkut isu Covid-19, dan memiliki kesadaran yang cukup untuk tetap patuh pada kebijakan publik. Golongan masyarakat penyangkal, bersifat apatis, mudah terprofokasi berita bohong, dan memiliki kesadaran rendah sehingga cenderung melakukan pengabaian terhadap kebijakan publik yang menyangkut protokol kesehatan. Sejatinnya setiap manusia akan memilih prioritas pilihan yang lebih menguntungkan

baginya. Misalnya, dalam pilihan pragmatis, ketika mereka sedang dalam kondisi sakit maka mereka akan lebih memprioritaskan kesehatan, namun ketika mereka dalam keadaan sehat maka ekonomi akan menjadi prioritasnya.

Covid-19 tidak hanya menyerang siapapun yang sedang dalam kondisi tidak prima dan atau memiliki riwayat penyakit komorbid, namun pada kenyataannya virus ini juga menyerang mereka yang sehat. Menurut ahli virologi Imperial College London, Michael Skinner, "Sangat mungkin sebagian dari tubuh manusia memiliki susunan genetik tertentu yang memungkinkannya merespon infeksi virus corona secara buruk" (McKie, 2020). Fokus perhatian terletak pada kekebalan individu dan kelompok (*individual and herd immunity*). Pembangunan benteng pertahanan imunitas dapat dilakukan

dengan memperhatikan beberapa aspek eksternal dan internal, yakni yang terkait dengan kesehatan fisik, psikologis, dan sosiologis. Pentingnya mengendalikan infodemic menjadi sangat penting untuk digalakkan manakala banyak masyarakat yang menjadi korban kekeliruan informasi atau terpaparnya berita bohong. Kontradiksi yang ada dalam infodemic membuat masyarakat terbelah dan akan memiliki rasa kepercayaan yang kurang terhadap pemerintah. Misalnya, kemunculan konspirasi “di-Covid-kan” di kalangan masyarakat. Di satu sisi masyarakat enggan bila didiagnosa terjangkit Covid-19 namun di sisi lain tenaga medis memiliki kewenangan untuk mendiagnosis dan menetapkan status pasien, termasuk ketika pasien tersebut diduga terserang virus corona (probable case). Persoalan lain yang turut mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat kompleks adalah “pengkambinghitaman” Covid-19. Pandemi Covid-19 seringkali dijadikan alasan suatu perlambatan dan kegagalan yang terjadi sehingga ada ekspektasi terhadap orang lain untuk bersikap maklum.

Gejolak terjadi di masyarakat khususnya ketika program vaksinasi dijalankan dengan mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga negara. NIK dapat diketahui dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun ironisnya tidak semua masyarakat memilikinya. Masyarakat adat merupakan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas tersebut. Meskipun telah disadari bersama bahwa kartu identitas tersebut merupakan hak dasar setiap warga negara. Penyelenggaraan program vaksinasi ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat adat. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat adat yang tervaksinasi berjumlah kurang dari satu persen dari total kelurahan 17 juta masyarakat adat (Deutsche Welle, 2021). Vaksinasi yang tersentralisasi akan memicu timbulnya ketimpangan sosial yakni berupa ketidaksetaraan dalam kesehatan. Kesehatan sejatinya merupakan hak asasi manusia bukan hak istimewa (privilege).

Kesenjangan telah terjadi diantaranya kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di wilayah terdepan, terluar, tertinggal serta di wilayah adat. Hal ini membuat masyarakat sulit mengakses hak atas kesehatan. Akibatnya mereka memiliki kerentanan lebih terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Pandemi Covid-19 merupakan titik balik bagi seluruh masyarakat global untuk dapat memaknai lebih solidaritas, empati, toleransi bahkan kerjasama. Musuh yang dihadapi dunia bukan sekedar ancaman kriminalitas maupun musibah tetapi juga kecerobohan dan egoisme manusia. Sejak awal konspirasi Covid-19 menyeruak memberitakan ketidakpastian asal muasal virus itu menyebar, mulai dari hipotesis teori kebocoran laboratorium Wuhan, penyeretan pelibatan pihak selain China, hingga propaganda balasan tentang teori kebocoran laboratorium militer Amerika Serikat yang dinilai disinformatif (Ramzy dan Chien 2021). Kini, masyarakat berusaha berdamai dengan musibah ini dan beradaptasi terhadapnya. Kesehatan menjadi prioritas utama yang dikedepankan mengingat virus corona bermutasi dan berpindah melalui berbagai media dalam kurun waktu yang cepat sehingga pengendalian itu sedikit sulit dilakukan – sebagaimana efek penyebaran berita di internet. Fokus pemerintah hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, ialah menargetkan setiap warga negara untuk divaksinasi. Aturan ini mewajibkan seluruh individu yang berada di wilayah tersebut harus telah terkonfirmasi tervaksinasi. Negara (pemerintah) memiliki kuasa penuh atas otoritas tubuh manusia. Mengapa vaksin bukan menjadi pilihan sementara beberapa orang berpandangan dan bersikap skeptis? Pengambilalihan peran individu oleh negara dalam hal ini dikarenakan kecanggihan virus ini mengakibatkan setiap orang menggantungkan kehidupannya pada orang lain – satu orang dalam kondisi tidak tervaksinasi akan membahayakan hampir keseluruhan orang yang telah tervaksinasi – no one is safe until everyone is. Bahkan tidak hanya negara, lembaga supranasional menyerukan

“distribusi vaksin yang adil adalah keharusan kemanusiaan,” pilihan yang tersedia kemudian bukan dilihat dalam sudut pandang kebebasan atau hak asasi individu melainkan hak asasi yang bersifat sosial yang didasarkan pada dua pilihan vaksin nasionalisme atau solidaritas manusia (Mekki 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana ikatan ketergantungan itu begitu erat hingga tidak hanya menyentuh ruang sakral pribadi namun lebih dalam soal keselamatan jiwa yang terancam dalam kurun waktu yang singkat dan tidak terduga. Dengan demikian, seolah tidak ada pilihan bagi ego untuk menghindar dari vaksinasi atas nama kebebasan atau hak asasi manusia. Jika dimasukkan dalam pandangan Thomas dan Thomas (Setidaknya pandemi Covid-19 telah membentuk dan menciptakan satu wawasan sosiologis dasar yang terkait dengan ‘kepercayaan dalam bermasyarakat’ yaitu bilamana orang percaya bahwa sesuatu itu benar maka konsekuensinya akan benar – masyarakat adalah representasi dari apapun yang diwujudkan secara kolektif (Wettergren, Holmes, dan Manning 2020, 116). Upaya perlindungan diri itu menjadi gaya hidup baru yang membudaya, dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Terhadap pembudayaan era normal baru ini, masyarakat tidak hanya diharuskan patuh pada serangkaian aturan yang telah diproduksi namun juga muncul penciptaan sanksi sosial yang secara tidak langsung menghakimi mereka yang tidak patuh pada protokol kesehatan, yaitu melalui tindakan yang berupa penghindaran, mereduksi kepercayaan, stigma dan stereotipe, hingga perlakuan diskriminatif. Ini merupakan konsekuensi dari suatu kebudayaan, karena sejatinya kebudayaan itu bersifat publik maka akan terkait dengan kehidupan sosial (Geertz 1992, 15).

Sebagai sebuah subjek hukum, negara bertanggung jawab atas bencana yang terjadi, kelangsungan hidup suatu bangsa terletak pada tubuh-tubuh manusianya yang sehat hingga mereka dapat menjadi anak bangsa yang produktif

bahu membahu membangun negara. Kebangkitan ini merupakan tujuan yang dikehendaki, oleh karenanya guna mempercepat pemulihan dan memperkuat pertahanan komunitas maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan pelayanan vaksinasi secara door to door (mendatangi masyarakat). Cara ini akan banyak membantu masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terdepan, terluar, tertinggal maupun mereka yang tidak memiliki akses karena faktor administrasi seperti ketiadaan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (misalnya bagi masyarakat adat), keterbatasan ekonomi, maupun kesenjangan informasi dan teknologi. Baik masyarakat maupun pemerintah aktif dalam pendistribusian vaksin karena vaksinasi merupakan serangkaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial sekaligus yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terlembaga seolah memberikan konsekuensi logis bahwa keselamatan seseorang bergantung pada orang lain dalam suatu rantai ekosistem kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk berupaya melindungi keselamatan bersama. Budaya normal baru mengandung persepsi bahwa individu-individu dalam tatanan sistem kolektif masyarakat terlibat dalam perilaku dan situasi kondisi yang sebenarnya tidak mereka ciptakan sendiri – pengaruh eksternal yang sangat kuat sehingga menuntutnya berada dalam pilihan yang dibentuk secara kolektif melalui sistem di luar kendali individu (Nulman 2022, 11).

Perubahan sosial yang menciptakan kebiasaan penormalan baru setidaknya mengandung biaya transisi (cost of transition). Pada masa peralihan dari era normal ke era normal baru manusia beradaptasi sedemikian rupa sehingga di dalamnya mereka menanggung biaya untuk percobaan dan kegagalan (trial and error) yang lebih intens. Sebagai contoh, pembatasan sosial berdampak pada penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, otomatisasi, dsb. tetapi dilema setelahnya adalah misalnya terkait persoalan apakah pembatasan sosial berdampak signifikan terhadap kuantitas jejak karbon yang dihasilkan. Ilmuan

sekiranya akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal yang belakangan ini. Pada masa transisi ini, manusia mencoba membentuk sistem alternatif baru guna menggantikan sistem lama yang tidak dapat diterapkan di era pandemi Covid-19. Pemenuhan keadilan pun dapat ditelaah melalui pendistribusian kesempatan dan peluang di masyarakat. Pada saat masyarakat adat berjuang melawan dan berusaha keras beradaptasi dengan Covid-19, mereka juga berhadapan dengan persoalan fundamental lain, seperti pelegitimasi kepemilikan tanah maupun hutan adat. Diantaranya perampasan tanah oleh PT Perkebunan Nusantara II terhadap tanah yang diduduki oleh masyarakat adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian, Desa Selemak, Sumatra Utara pada September 2020. Kesenjangan yang terjadi pada masa transisi ini bisa jadi bersifat sementara meskipun semakin besar jaraknya. Ini merupakan potret suram bagaimana masyarakat adat menjadi lebih rentan terhadap konflik dan semakin mengalami kerugian berlipatganda akibat revolusi pandemi Covid-19.

Pada masa transisi ini, hukum beradaptasi sebagaimana aspek sosial dan ekonomi sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Apakah sistem hukum berjalan lebih efektif atau lebih baik dalam menyediakan keadilan bagi masyarakat di masa pandemi? Perubahan sistem hukum dewasa ini sedikit banyak disesuaikan atau pada kata lain dipengaruhi oleh perubahan sosial yang lebih dulu terjadi di masyarakat. Pertanyaannya kemudian, apakah penerapan protokol baru ada setelah adanya peraturan hukum? Tidak, perilaku masyarakat telah berubah sejak merebaknya Covid-19 di Indonesia dan pada saat bersamaan hukum beradaptasi dengan cepat guna menjadi acuan bagi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat – hal ini menyangkut keselamatan jiwa banyak orang. Adaptasi hukum dalam hal ini tidak secepat reaksi masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang mana sebagian besar masyarakat telah bersikap waspada sehingga mereka menerapkan penggunaan masker, misalnya, meskipun aturan yang

dipublikasi oleh pemerintah bersifat himbuan atau rekomendasi yang sejatinya tidak seimperatif norma hukum. Meskipun sebenarnya, dalam praktiknya, adaptasi hukum – penciptaan hukum baru terkait pandemi Covid-19 sangat cepat dihasilkan bahkan keberadaannya mengikat setiap individu untuk patuh melaksanakan aturan-aturan seperti protokol kesehatan – hal ini mendorong percepatan perubahan sosial dan pelembagaan 'kebiasaan normal baru'. Pandemi Covid-19 menyuarakan tuntutan sosial kemanusiaan yang menuntun pada terjadinya perubahan hukum yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial masif (Friedman, 1975). Perubahan ini seperti yang telah dikemukakan oleh Friedman, yakni merupakan perubahan dari luar sistem hukum yang berpengaruh terhadapnya sehingga pada akhirnya perubahan sistem hukum itu berdampak apa yang ada di luar sistem hukum – dalam hal ini masyarakat.

Masyarakat adat menyadari sepenuhnya kondisi merebaknya virus corona sehingga berbagai cara dilakukan dalam rangka mengatasi musibah kemanusiaan ini, mulai dari meningkatkan stok lumbung padi sebagai persediaan pangan, menggalakkan pengobatan tradisional, hingga mengadakan ritual adat sebagai bentuk pengobatan spiritual karena pandemi ini bukan hanya dianggap sebagai suatu penyakit yang menyerang fisik manusia tetapi juga sangat berpengaruh pada mentalitas manusia. Disamping kesadaran itu, persepsi keliru juga ada di sekitar masyarakat adat. Sebagian dari mereka belum menganggap Covid-19 sebagai ancaman atau musuh bersama karena mereka selama ini terbiasa mengatasi penyakit yang dideritanya dengan pengobatan tradisional tanpa harus pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pengaturan kebijakan infodemik tidak boleh secara samar maupun tegas memberi pembatasan yang tidak semestinya pada akses terhadap informasi karena pada saat ini masyarakat berhak atas informasi real-time dan kredibel sementara pembatasan yang tidak tepat akan mengakibatkan turunnya kapasitas publik untuk memverifikasi

keakuratan informasi yang ada (Radu 2020, 2). Guna menghindari pola pikir yang keliru mengenai pandemi ini, maka teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menjangkau masyarakat adat dengan infodemic yang akurat dan tidak bersifat kontradiktif. Selain itu, pengoptimalan peran tokoh adat dan agama sebagai figur yang disegani menjadi salah satu kunci menyukseskan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

Perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 setidaknya meninggalkan dua kemungkinan dalam melihat arah perubahan. Pertama, perubahan ini akan bersifat sementara dan akan kembali ke keadaan semula. Revolusi pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya memungkinkan perubahan sosial – budaya normal baru dalam jangka waktu yang panjang namun di sisi lain juga memberikan rentang waktu tertentu (meskipun dengan prediksi yang tidak pasti) bagi masyarakat untuk menyesuaikan tuntutan-tuntutan yang ada sebagai akibat daripada merebaknya virus corona. Perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat dan berpotensi kembali seperti pada kondisi awal sebelum pandemi Covid-19 sekiranya dapat diidentifikasi sebagai ‘revolusi kumulatif, retroaktif’ dengan mengadopsi

SIMPULAN DAN SARAN

Saat ini manusia disebut sedang dihadapkan pada kondisi perang melawan Covid-19. Deglobalisasi memperlambat perekonomian global dan berdampak besar bagi perkembangan peradaban manusia. Dalam masa pandemi Covid-19, publik menilai saat ini kesehatan lebih terancam daripada ekonomi sebab pendistribusian sumber daya yang terbatas dianggap lebih dapat dikondisikan daripada kesehatan yang dilihat dari kemungkinan terburuk manusia dapat bertahan dalam serangan virus corona. Kesehatan bukanlah suatu keistimewaan melainkan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pemenuhannya harus memenuhi asas persamaan (equality). Dalam situasi kritis, individu tidak berfungsi sebagai pengambil peran (role-taking) tetapi pembuat peran

istilah Moore, yang mana bermaksud menunjukkan kemungkinan perubahan terhenti pada tahapan tertentu dan bereaksi kembali ke tahap awal (Moore 1960, 817) karena desakan kebutuhan-kebutuhan privat dan publik yang mempertimbangkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang lebih baik dalam artian ideal daripada saat masa pandemi berlangsung akibat banyaknya keterbatasan dalam bersosialisasi. Kedua, perubahan akan terjadi dalam kurun waktu yang lama dan cenderung mengarah pada penerapan budaya baru. Adaptasi pada kondisi normal baru saat ini merupakan suatu bentuk penyesuaian interaktif yang mana baik individu maupun masyarakat harus melakukan penyesuaian kembali dengan munculnya sistem sosial baru yang dimungkinkan hanya akan bertahan untuk sementara waktu dan berangsur ditinggalkan ketika kondisi normal kembali (Carr, 1932). Meskipun demikian, tidak juga dapat dikelak apabila penyesuaian masyarakat pada saat ini merupakan suatu penyesuaian budaya yang pada akhirnya mengarah pada budaya baru untuk menciptakan suatu keseimbangan baru pula. Dengan demikian, perubahan sosial yang terjadi tidak hanya terbatas pada perubahan relasional tetapi juga termasuk perubahan budaya.

(*role-making*) hal ini akan selalu berdampak pada dua resiko, pertama penciptaan ketertiban atau konflik (Chase-Dunn dan Lerro 2016, 62). Era normal baru mendikte manusia untuk menciptakan pembaharuan sistem dalam segala bidang sebab yang dibutuhkan adalah kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan akurasi yang berhadapan dengan aspek krusial kehidupan yakni kesehatan dan ekonomi. Protokol kesehatan bukan sekedar instruksi untuk dipatuhi melainkan telah menjadi tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Dunia sosial terdiri dari berbagai peristiwa secara temporal dan spasial termasuk apa yang terjadi dewasa ini, pandemi Covid-19 merupakan suatu fenomena peristiwa yang mengesankan publik dengan kompleksitas konsekuensi yang

ditimbulkannya yang mempengaruhi kebudayaan atau seluruh pola normalitas berulang yang dalam bahasa Collins disebut sebagai struktur (Collins 1988, 243). Di era pandemi ini, masyarakat marginal mengalami kerentanan berlipat yang kemudian mengarah pada kemiskinan dan ketidaksetaraan yang mengakibatkan timbulnya resiko lebih. Selain itu, kesenjangan teknologi menghasilkan ketidakmerataan informasi dan berimbas pada penerimaan informasi oleh individu ataupun kelompok masyarakat pada akhirnya menimbulkan masyarakat yang terbagi. Oleh karenanya, perlu penguatan kelembagaan dalam rangka menjaga stabilitas dalam segala bidang. Dengan demikian, diharapkan hal itu dapat membantu mengurangi kesenjangan dan masyarakat memiliki mentalitas dan kesadaran yang relatif sama dalam rangka menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, P. 2021. Kasus Covid-19 Naik, Akses Terbatas, Vaksinasi Minim: Pertahanan Masyarakat Adat Mulai Jebol. *Project Multatuli*. Diakses pada 22 Agustus 2021, dari <https://projectmultatuli.org/kasus-Covid-19-naik-akses-terbatas-vaksinasi-minim-pertahanan-masyarakat-adat-mulai-jebol/>.
- Ahmed, A., & Jackson, J. 2021. Race, Risk, and Personal Responsibility in the Response to Covid-19. *Columbia Law Review Forum*, 121: 47-70.
- Barasheed, O., et. al. 2016. Uptake and Effectiveness of Facemask Against Respiratory Infections at Mass Gatherings: A Systematic Review. *International Journal of Infectious Diseases*, 1-7. doi:10.1016/j.ijid.2016.03.023.
- Blossfeld, H. 1996. Macro-Sociology, Rational Choice Theory, and Time: A Theoretical Perspective on the Empirical Analysis of Social Processes. *European Sociological Review Rational Choice Theory and*
- Large-Scale Data Analysis* 12 (2): 181-206. doi:10.2307/522435.
- Braveman, P., & Gottlieb, L. 2014. The Social Determinants of Health: It's Time to Consider the Causes of the Causes. *Public Health Reports*, 129: 20-2.
- Carr, L. J. 1932. Disaster and the Sequence-Pattern Concept of Social Change. *The American Journal of Sociology*, 38 (2): 207-18.
- Chandra, W. 2020. Hadapi COVID-19, Masyarakat Adat Banua Lemo Karantina Wilayah hingga Jaga Stok Pangan. *Mongabay*. Diakses pada 23 Agustus 2021, dari <https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/hadapi-Covid-19-masyarakat-adat-banua-lemo-karantina-wilayah-hingga-jaga-stok-pangan/>.
- Chase-Dunn, C., & Lerro, B. 2016. *Social Change: Globalization from the Stone Age to the Present*. Oxon: Routledge.
- Coleman, J. S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Collins, R. 1988. The Micro Contribution to Macro Sociology. *Sociological Theory* 6 (2): 242-53. doi:10.2307/202118.
- Cooley, C. H. 1897. The Process of Social Change. *Political Science Quarterly*, 12 (1): 63-81.
- Coser, L. A. 1957. Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology* 8 (3): 197-207. doi:10.2307/586859.
- Costa, F. M. L. 2021. Kasus Covid-19 Terus Meluas di Pedalaman Papua. *Kompas*. Diakses pada 23 Agustus 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/08/kasus-Covid-19-terus-meluas-di-pedalaman-papua>.
- Etzioni, A. 2017. Toward A Macrosociology. *Academy of Management Proceedings* 1967 (1):

- 12–33.
doi:10.5465/ambpp.1967.4980638.
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gans, J. 2020. *The Pandemic Information Gap: The Brutal Economics of Covid-19*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Geertz, C. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, A. 2009. *Sociology*. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
- Goldthorpe, J. H. 2007. Current Issues in Comparative Macrosociology. In John H. Goldthorpe, *Sociology: Critique and Program*, Edisi ke-2 Volume 1: 39-60. Stanford, California: Stanford University Press.
- Hawley, A. H. 1992. The Logic of Macrosociology. *Annual Review of Sociology* 18: 1-15. doi:10.1146/annurev.so.18.080192.000245.
- Homer-Dixon, T. 2020. Coronavirus Will Change the World. It Might Also Lead to a Better Future. *The Globe and Mail*. Diakses pada 18 Agustus 2021, dari <https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-coronavirus-is-a-collective-problem-that-requires-global/>.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. 2000. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, 65 (1): 19-51.
- Inhorn, M. C., & Brown, P. J. 1990. The Anthropology of Infectious Disease. *The Annual Review of Anthropology*, 19: 89-117.
- Kaplan, A., & Wolf, Jr. C. 2017. *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. New York: Routledge.
- Liker, J. K., et. al. 1999. Perspectives on Technology and Work Organization. *The Annual Review of Sociology*, 25: 575-96.
- Lyman, S. M. 1988. Review: Symbolic Interactionism and Macrosociology. *Sociological Forum* 3 (2): 295-301. doi:10.2307/684372.
- Maclver, R. M., & Page, C. H. 1957. *Society: An Introductory Analysis*. New York: Rinehart and Company, Inc.
- Mackenzie, D. 2020. *Covid-19: The pandemic That Never Should Have Happened and How to Stop the Next One*. New York: Hachette Book Group, Inc.
- McKie, R. 2020. Why Do Some Young People Die of Coronavirus? *The Guardian*. Diakses pada 23 Agustus 2021, dari <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/why-do-some-young-people-die-of-coronavirus-Covid-19-genes-viral-load>.
- Mekki, N. 2021. No-one is safe until everyone is safe – why we need a global response to COVID-19. *UNICEF*. Diakses pada 25 Oktober 2021. <https://www.unicef.org/press-releases/no-one-safe-until-everyone-safe-why-we-need-global-response-Covid-19>.
- Moore, W. E. 1960. A Reconsideration of Theories of Social Change. *American Sociological Review* 25 (6): 810–18. doi:10.2307/2089978.
- Nulman, E. 2022. *Coronavirus Capitalism Goes to the Cinema*. Oxon dan New York: Routledge.
- Perrin, R. G. 1973. The Functionalist Theory of Change Revisited. *The Pacific Sociological Review* 16 (1): 47–60. doi:10.2307/1388653.
- Persoon, G. 1998. Isolated Groups or Indigenous Peoples: Indonesia and the International Discourse. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 154 (2): 281-304.
- Radu, R. 2020. Fighting the 'Infodemic': Legal Responses to COVID-19

- Disinformation. *Social Media + Society*, 1–4.
doi:10.1177/2056305120948190.
- Ramzy, A., & Chien, A. C. 2021. Rejecting Covid Inquiry, China Peddles Conspiracy Theories Blaming the U.S. *The New York Times*. Diakses pada 25 Oktober 2021. <https://www.nytimes.com/2021/08/25/world/asia/china-coronavirus-Covid-conspiracy-theory.html>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 3 November 2021. Peta Sebaran COVID-19. Diakses pada 3 November 2021, dari <https://Covid19.go.id/peta-sebaran>.
- Sayer, A. 2010. *Method in Social Science*. London, New York: Routledge.
- Tiruneh, G. 2014. Social Revolutions: Their Causes, Patterns, and Phases. *SAGE Open*, 1–12.
- Turshen, M. 1984. *The Political Ecology of Disease in Tanzania*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
- Ulung, A. K. 2021. Indonesia: Indigenous Groups Face COVID Vaccine Barriers. *Deutsche Welle*. Diakses pada 18 Agustus 2021, dari <https://www.dw.com/en/indonesia-indigenous-groups-face-Covid-vaccine-barriers/a-58673603>.
- Vago, S., & Steven E. Barkan. 2018. *Law and Society*. New York: Routledge.
- Wettergren, Å., Holmes, M., & Manning, N. 2020. Emotions in the Pandemic: Crises and Politics of Change. *Emotions and Society* 2 (2): 115–19. doi:10.1332/263169020X15988069522042.